

Pengaruh Depresiasi Terhadap Nilai Wajar Aset Dan Implikasinya Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Sukeng Ngesti Rahtama Putra¹, Ananta Dian Pratiwi²
Universitas Terbuka -¹sukeng.ngesti@gmail.com
Universitas Negeri Manado -²ananta.pratiwi@unima.ac.id

Abstrak—The purpose of this paper is to determine the effect of depreciation value calculations on the fair value of a State Property (BMN) asset and the impacts caused when the asset is written off either through pure write-off and transfer. Adjusting the applicable regulations regarding the mechanism for calculating the depreciation value of an asset. What is the procedure for recording the fair value of assets and writing off State Property (BMN) in accordance with applicable regulations. Disclosure and recording in the financial statements of a government institution must be based on correct calculations and refer to applicable laws and regulations. As a reference for the office to carry out the process of managing State Property (BMN) asset units so that they are appropriate and do not experience fatal damage so that the useful life of the goods can be as long as possible even though the regulations have an age limit. To gain a deeper understanding of the topic being studied, the researcher used a qualitative descriptive research method. Using data obtained from the State Asset Management Information System (SIMAN) application at the Banggai District Attorney's Office Branch in Bunta and direct observation of the asset objects to be studied.

Keywords: Depreciation, Fair Value of Assets, Write-off of BMN

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan aset atau Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu hal yang sangat penting karena tanpa adanya hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dari sebuah institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan benar akan membuat sebuah aset memiliki umur manfaat yang lebih panjang dari pada umur manfaat yang secara teori akuntansi terbatas hanya beberapa tahun saja (Widyatama dan Suharsono, 2020). Hal tersebut juga akan berdampak kepada kebijakan mengenai pengadaan barang atau jasa baru atau penghapusan sebuah aset yang sangat penting.

Pelaksanaan pengelolaan suatu aset harus betul-betul dipahami oleh seorang pegawai yang bertanggungjawab atau mendapat tugas sebagai pengelola dan pencatat aset BMN (Putri et al., 2023). Kompetensi yang dimiliki juga sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pencatatan, pengelolaan dan penyajian laporan terkait daftar aset yang dimiliki oleh sebuah instansi pemerintah. Ilmu dan pengalaman dapat dipelajari dari berbagai macam bidang ilmu dari dunia pendidikan dan pelatihan secara mandiri. Kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan sebuah instansi berdasarkan dari laporan daftar aset yang disajikan oleh penanggungjawab, baik untuk pengadaan barang baru atau penghapusan dalam catatan dan sistem dikarenakan umur masa manfaatnya yang sudah habis atau rusak berat dan hilang.

Dalam PSAK No. 16 disebutkan bahwa sebuah barang berwujud yang dapat diakui sebagai aktiva dan masuk kedalam kategori aktiva tetap, harus dihitung berdasarkan biaya perolehan pada saat awal (Hery, 2021). Sedangkan depresiasi adalah sebuah perhitungan sistematis untuk menyusutkan jumlah aset dari awal masa perolehan hingga akhir masa manfaat dari aset tersebut. Membandingkan nilai depresiasi yang dicatat setiap bulan dengan menggunakan metode garis lurus akan menentukan besaran nilai wajar aset yang dapat dijadikan sebagai acuan selain nilai jual barang pada saat tersebut dilelang. Sehingga dalam proses penghapusan aset tidak serta merta hanya menghilangkannya dari daftar aset tetapi juga memberi pemasukan dari harga jual yang diperoleh pada saat pelelangan. Untuk aset yang telah rusak berat atau hilang hanya akan diajukan untuk penghapusan dari daftar aset saja namun secara prosedural harus mempertimbangkan dan mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan data-data yang diperoleh dari aplikasi SIMAN (Sistem

Informasi Manajemen Aset Negara) pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta dan pengamatan langsung terhadap objek aset yang akan diteliti. Berpedoman pada aturan – aturan yang telah berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI sehingga dalam proses perhitungan dan pencatatan aset tetap baik nilai depresiasi, nilai wajar dan mekanisme penghapusannya tidak melanggar dari aturan yang telah ditetapkan. Menganalisis data yang diperoleh dengan cara membandingkan data yang tercatat pada sistem SIMAN yang digunakan sebagai objek penelitian apakah sudah sesuai secara perhitungan baik nilai depresiasi dan umur manfaatnya. Sehingga dari pemeriksaan fisik dan data yang tercatat pada sistem diharapkan ada kesesuaian dan tidak terjadi perbedaan informasi. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan pengumpulan data berupa daftar aset atau Barang Milik Negara pada sistem SIMAN yang ada pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta.
- b) Daftar aset yang diperoleh tersebut dibandingkan dengan barang yang ada secara fisik (pencocokan data) apa sudah sesuai dengan yang ada di kantor atau tidak.
- c) Pencatatan yang dilakukan oleh pegawai terhadap aset yang dimiliki sudah sesuai dengan standar akuntansi apa belum baik data tahun perolehan, nilai perolehan, nilai depresiasi dan nilai wajar buku pada aset hingga saat ini (bulan november 2024).
- d) Menganalisis data aset tersebut mengenai prosedur pengelolaan, pemeliharaan, pencatatan dan mekanisme penghapusan daftar aset yang dimiliki ketika barang / aset itu sudah habis masa manfaatnya atau rusak dan hilang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) merupakan aplikasi yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengelola daftar aset seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Daftar aset yang terdapat pada aplikasi SIMAN Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta merupakan tanggungjawab dari Kantor Kejaksaan itu sendiri baik dalam pencatatan, pelaporan dan pengelolaannya. Setiap aset atau Barang Milik Negara (BMN) diperoleh melalui pengadaan atau pembelian menggunakan dana APBN dan juga yang perolehannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan aset negara atau daerah. BMN berdasarkan standar akuntansi pemerintah dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu aset tetap yang memiliki umur manfaat selama 12 (dua belas) bulan dan aset lancar lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam setiap pelaporan sebuah aset BMN pada aplikasi SIMAN akan ditampilkan nilai dan tahun perolehan dari suatu barang. Kedua indikator tersebut sangat menentukan besaran nilai depresiasi (penyusutan) menurut standar akuntansi pemerintah. Menurut Wahyuni & Khoirudin (2020) depresiasi merupakan sebuah perhitungan sistematis sebuah aset sepanjang masa manfaatnya yaitu mengurangi biaya perolehan dengan biaya perolehan yang dibagi sepanjang masa manfaatnya tiap bulan. Dari perhitungan tersebut akan diperoleh nilai buku atau nilai wajar sebuah aset dalam laporan keuangan yang dapat menjadi acuan ketika akan dilakukan penghapusan melalui lelang dan penghapusan khusus (Bastian, 2019; Bastian, 2020). Sehingga penting bagi Kementerian atau Lembaga dalam melaporkan secara rinci daftar aset BMN yang dimiliki dengan menyajikan pencatatan nilai wajar dari setiap aset BMN.

Berikut ini adalah daftar sebagian BMN pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta yang menjadi objek penelitian penulis dengan penjelasan lengkap mengenai kondisi barang tersebut:

- a) 3 (tiga) unit sepeda motor dengan kondisi baik.
- b) 2 (dua) unit kendaraan roda empat (mobil) dengan kondisi 1 rusak berat dan 1 baik.
- c) 1 (satu) unit mesin absensi dengan kondisi rusak.
- d) 1 (satu) unit LCD projector / infocus dengan kondisi baik.
- e) 1 (satu) unit brankas dengan kondisi baik.
- f) 1 (satu) unit mesin pencetak label merk Janz JZ Gamma dengan kondisi baik.
- g) 1 (satu) unit mesin penghancur kertas merk Krisbow dengan kondisi baik.

Aset BMN dengan kondisi rusak akan diajukan penghapusan oleh Kantor Kejaksaan dengan mengikuti mekanisme prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan aset yang masih dalam kondisi baik akan tetap digunakan untuk kegiatan operasional kantor hingga ada kebijakan baru terkait pengelolaan aset BMN tersebut. Berdasarkan aplikasi

SIMAN berikut ini adalah detil aset yang menjadi objek penelitian:

Tabel 1 Daftar Aset BMN

No.	Nama Aset	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Wajar
1	Mobil Toyota Hilux	19/12/2007	7 tahun	Rp. 109.105.000	Rp. 109.105.000	0
2	Motor Suzuki Smash	3/8/2010	7 tahun	Rp. 15.904.000	Rp. 15.904.000	0
3	Mesin Absensi	2/1/2012	5 tahun	Rp. 306.244.400	Rp. 306.244.400	0
4	Brankas	14/7/2014	5 tahun	Rp. 19.778.000	Rp. 19.778.000	0
5	Mobil Toyota Avanza	3/11/2017	7 tahun	Rp. 217.156.616	Rp. 217.156.616	0
6	LCD Projector / Infocus	24/8/2020	5 tahun	Rp. 21.409.300	Rp. 17.127.440	Rp. 4.281.860
7	Alat Penghancur Kertas	3/7/2023	5 tahun	Rp. 3.496.500	Rp. 699.300	Rp. 2.797.200
8	Motor Honda ADV 160	28/11/2023	7 tahun	Rp. 39.930.000	Rp. 5.704.286	Rp. 34.225.714
9	Motor Honda CRF 150	28/11/2023	7 tahun	Rp. 39.930.000	Rp. 5.704.286	Rp. 34.225.714
10	Alat Pencetak Label	1/12/2023	5 tahun	Rp. 3.862.800	Rp. 772.560	Rp. 3.090.240

Sumber: siman – cabjari bunta www.siman.kemenkeu.go.id/

Depresiasi dapat mempermudah dalam mengalokasikan biaya yang lebih akurat dengan menyusutkan nilai aset secara bertahap selama masa manfaatnya dalam penggunaan aset tersebut. Depresiasi juga meminimalisir kesalahan penaksiran nilai aset yang sudah digunakan dalam periode waktu tertentu. Menurut Narsa (2019) faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi yaitu:

- a) Harga pembelian asset
- b) Biaya pengiriman
- c) Biaya pemasangan

Pada daftar aset BMN yang ada pada aplikasi SIMAN tersebut diatas, diketahui bahwa metode penentuan biaya depresiasi menggunakan metode garis lurus yaitu membagi rata nilai sebuah aset dengan masa manfaat yang dimiliki. Depresiasi dalam penyajian laporan keuangan memiliki peran penting dalam menilai kewajaran sebuah aset BMN serta dapat mempengaruhi kebijakan dalam pengelolaan dan penghapusan dari daftar asset (Hasri et al., 2023). Depresiasi dapat memastikan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan mendekati nilai pasar aset BMN. Pengaruh depresiasi terhadap nilai wajar aset yaitu:

- a) Nilai wajar aset lebih tinggi dari pada nilai buku aset maka nilai buku yang diserahkan harus diturunkan.
- b) Nilai wajar aset lebih rendah dari pada nilai buku aset maka nilai wajar aset ditetapkan sebesar nilai buku aset.

Nilai wajar atau nilai buku dibutuhkan untuk menilai sebuah aset dimasa depan sebagai pertimbangan dalam proses penghapusan melalui lelang atau pemindahtanganan (Wahyuningrum, 2022). Penghapusan aset juga dilakukan karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

- a) Kerusakan fisik
- b) Usia sudah tua
- c) Kemajuan teknologi
- d) Tidak lagi bermanfaat untuk kegiatan operasional
- e) Tidak memiliki nilai sisa dan nilai jual

Masa manfaat sebuah aset yaitu suatu periode yang dimiliki sebuah aset untuk dipergunakan dalam proses pelayanan publik atau operasional kantor. Masing-masing jenis aset memiliki masa manfaat yang berbeda. Peraturan yang menjadi pedoman penentuan masa manfaat suatu aset BMN yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 mengenai “Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Pada Entitas Pemerintah Pusat”. Berikut ini rincian tabel masa manfaat aset BMN:

Tabel 2 Masa Manfaat Aset BMN

Nama Aset	Umur/Masa Manfaat	
	Masa Manfaat	
	Tahun	Semester
Alat Besar		
Alat Besar Darat	10	20
Alat Besar Apung	8	16
Alat Bantu	7	14
Alat Angkutan		
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	14
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	4
Alat Angkutan Apung Bermotor	10	20
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	6
Alat Angkutan Bermotor Udara	20	40
Alat Bengkel dan Alat Ukur		
Alat Bengkel Bermesin	10	20
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	10
Alat Ukur	5	10
Alat Pertanian		
Alat Pengolahan	4	8
Alat Kantor & Rumah Tangga		
Alat Kantor	5	10
Alat Rumah Tangga	5	10
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
Alat Studio	5	10
Alat Komunikasi	5	10
Peralatan Pemancar	10	20
Peralatan Komunikasi Navigasi	15	30
Alat Kedokteran dan Kesehatan		
Alat Kedokteran	5	10
Alat Kesehatan Umum	5	10
Alat Laboratorium		
Unit Alat Laboratorium	8	16
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	30
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	30
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	20
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10	20
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	14
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	30
Nama Aset	Umur/Masa Manfaat	
	Masa Manfaat	
	Tahun	Semester
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrum	10	20
Alat Persenjataan		
Senjata Api	10	20
Persenjataan Non Senjata Api	3	6
Senjata Sinar	5	10

Nama Aset	Umur/Masa Manfaat	
	Masa Manfaat	
	Tahun	Semester
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrum	10	20
Alat Persenjataan		
Senjata Api	10	20
Persenjataan Non Senjata Api	3	6
Alat Khusus Kepolisian	4	8
Komputer		
Komputer Unit	4	8
Peralatan Komputer	4	8
Alat Eksplorasi		
Alat Eksplorasi Topografi	5	10
Alat Eksplorasi Geofisika	10	20
Alat Pengeboran		
Alat Pengeboran Mesin	10	20
Alat Pengeboran Non Mesin	10	20
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
Sumur	10	20
Produksi	10	20
Penglahan dan Pemurnian	15	30
Alat Bantu Eksplorasi		
Alat Bantu Eksplorasi	10	20
Alat Bantu Produksi	10	20
Alat Keselamatan Kerja		
Alat Deteksi	5	10
Alat Pelindung	5	10
Alat SAR	2	4
Alat Kerja Penerbangan	10	20
Alat Peraga		
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	20
Peralatan Proses/Produksi		
Unit Peralatan Proses/Produksi	8	16
Rambu-Rambu		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	14
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	30

Nama Aset	Umur/Masa Manfaat	
	Masa Manfaat	
	Tahun	Semester
Peralatan Olah Raga		
Peralatan Olah Raga	3	6
Bangunan Gedung		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	100
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	100
Monumen		
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	100

Sumber: Kepmenkeu Nomor : 295/KM.6/2019

Pada tabel detil aset yang dimiliki Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta diperoleh
 Halaman 1048

data bahwa terdapat asset-aset yang memiliki nilai buku 0 (nol) dengan kata lain sudah habis masa manfaatnya. Bahkan terdapat aset yang nilai bukunya sudah 0 (nol) tersebut dalam kondisi rusak berat, yaitu aset Mobil Toyota Hilux dan Mesin Absensi. Aset tersebut tidak dapat menunjang operasional kantor baik karena kondisi dan kebijakan dalam penerapan teknologi terbaru. Semakin lama kondisi aset BMN yang rusak tidak diperbaiki akan membuat kondisi aset tersebut susah untuk dilakukan penghapusan melalui pemindahtanganan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Luwuk. Hal tersebut juga menyebabkan kerugian negara semakin besar apabila barang yang rusak tersebut tidak bisa dilelang atau dapat uang pengganti. Tahap – tahap yang perlu dilakukan untuk penghapusan aset BMN oleh KPKNL Luwuk, yaitu:

1. Persiapan penghapusan dengan metode pemindahtanganan
Pedoman dalam pelaksanaan pemindahtanganan aset BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 yang terdiri dari:
 - a. Pembentukan panitia penghapusan internal.
 - b. Melakukan penelitian terhadap aset BMN dan dituangkan ke dalam berita acara penelitian.
 - c. Melaksanakan kegiatan penilaian dan dituangkan ke dalam laporan penilaian.
 - d. Pengajuan usulan penghapusan dengan metode pemindahtanganan kepada pengelola barang atau KPKNL.
 - e. Berdasarkan surat persetujuan yang diterbitkan pengelola barang, pengguna barang dapat melakukan permohonan penjualan BMN kepada instansi pelayanan lelang.
2. Pelaksanaan lelang
Serah terima dilaksanakan dan dituangkan ke dalam berita acara serah terima (BAST). Memastikan pembeli sudah membayar uang lelang ke rekening kas negara dengan memeriksa bukti pembayaran, selanjutnya pihak KPPN akan menyerahkan barang yang dilelang kepada pembeli dan dituangkan ke dalam BAST.
3. Pelaporan pelaksanaan lelang
Melaksanakan penghapusan aset BMN dari daftar barang kuasa pengguna dan atau barang pengguna. Laporan pelaksanaan lelang dilaporkan kepada KPPN dengan melampirkan dokumen pendukung berupa surat persetujuan penjualan aset BMN, pengumuman lelang, BAST aset BMN, bukti pembayaran ke rekening kas Negara dan salinan risalah lelang. Berdasarkan dokumen tersebut diatas pihak KPPN akan menerbitkan Surat Keputusan mengenai penghapusan aset BMN dan menjadi landasan bagi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta untuk menghapus aset BMN dari daftar barang kuasa pengguna.

Untuk aset BMN yang memiliki nilai buku 0 (nol) dengan kondisi masih baik, yaitu Motor Suzuki Smash, Brankas, dan Mobil Toyota Avanza masih dapat digunakan untuk mendukung operasional kantor tidak perlu dilakukan pengajuan penghapusan kepada KPPN sampai ada kebijakan lebih lanjut dari Kejaksaan. Sedangkan untuk aset BMN yang masih memiliki masa manfaat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sampai dengan habis masa manfaat yang dimiliki. Apabila dalam masa manfaat terjadi kerusakan atau kehilangan dapat dilakukan pengajuan persetujuan penghapusan kepada KPPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari pencatatan secara terperinci mengenai tahun perolehan, harga perolehan, nilai depresiasi dan nilai wajar sebuah aset dapat diperoleh gambaran berapa nilai yang akan diterima apabila sebuah aset tersebut akan dijual melalui sistem lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Besaran nilai rupiah yang akan menjadi dasar penetapan harga minimum lelang atas aset barang yang akan dilakukan penjualan. Apabila dalam pelaksanaan pembukuan ditemukan nilai wajar aset itu 0 (nol) dan akan dilakukan penghapusan dengan mekanisme lelang maka pihak kantor lembaga pemerintah dapat mengajukan penilaian asset kepada kantor jasa penilai yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga akan diperoleh nilai wajar atau nilai pasar yang akan dijadikan pedoman dalam penetapan harga minimum lelang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat penulis simpulkan bahwa nilai depresiasi sebuah aset BMN memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan nilai wajar dimasa mendatang apabila akan dilakukan penghapusan dan pemindahtanganan (lelang). Pencatatan pada laporan keuangan dan daftar aset BMN harus secara terperinci menampilkan tahun perolehan, harga perolehan, masa manfaat dan nilai depresiasi. Dari rincian daftar aset BMN tersebut akan diperoleh nilai wajar sebuah

aset secara update sesuai dengan masa laporan keuangan itu disajikan.

Dengan pencatatan dan pelaporan terkait aset yang benar dan sesuai dapat menjadi dasar pengelolaan barang yang benar sehingga dapat diperoleh masa manfaat yang lebih panjang dan mampu mendukung proses operasional sebuah kantor lembaga pemerintahan. Efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan aset juga akan meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Memanfaatkan anggaran biaya yang tepat secara efisien dan dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang menunjang perbaikan dalam layanan kepada masyarakat.

Dibutuhkan pemahaman dan keterampilan yang memadai oleh seorang penanggungjawab pengelola aset Barang Milik Negara (BMN) agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan aset negara yang semestinya dipergunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Memiliki pegawai yang secara kompetensi menguasai baik dalam hal pencatatan/pembukuan, pengelolaan dan penggunaan aset itu sendiri sehari-hari. Hal ini diperlukan untuk menyajikan laporan aset yang benar dan transparan.

Pengelolaan dan penggunaan aset harus dilakukan dengan prosedur yang tepat, pencatatan oleh penanggungjawab juga harus benar agar tidak terjadi kesalahan dalam penyajian aset pada laporan keuangan. Kebijakan dari pimpinan akan lebih tepat dan bijaksana dalam menentukan apakah butuh pengadaan aset baru dan penghapusan atau penjualan aset yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)*. Universitas Terbuka.
- Bastian, I. (2020). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Universitas Terbuka.
- Farhana, Arifuddin, Darmawat. (2023). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. 2(9). 1970-1979.
- Hasri, N. S., Irmalis, A., Sianturi, D. (2023). Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh Menggunakan Tindak Lanjut Pemindahtanganan. *Jurnal Sains Riset*. 13(1), 160-170.
- Hery. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah Sesuai PSAK dan IFRS*. Kompas Gramedia.
- Inayah, F. H. (2024). Sistem Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. *Jurnal Ilmiah Sistem Akuntansi*. 1-36.
- Narsa, I. M. (2019). *Akuntansi Manajemen (Edisi 3)*. Universitas Terbuka.
- Putri, G. A. E., Ilhanah, S., Rudhiya, Z., & Putri, S. M. S. (2023). Tinjauan Terkait Penilaian Barang Milik Negara Maupun Tujuan Lainnya. *Jurnal Acitya Ardana*, 3(1), 1–16.
- Wahyuni, S. & Khoirudin, R. (2020). Pengantar Manajemen Aset. Universitas Ahmad Dahlan.
- Wahyuningrum, C., Supadi, Y. M. (2022). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Sebagai Dasar Perbandingan Terhadap Penyusutan Aset Tetap Sesuai Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK-BMN). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. 27-36.
- Widyatama, B., Suhartono, B. (2020). Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*. 2(2). 13-25.